

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama dari mayoritas penduduknya.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan lebih dari 50% dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pembangunan di sektor pertanian yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat (Dillon (2008, dalam Husodo, 2009).

Kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan (*people centered development*). Model pembangunan demikian merupakan arah baru pembangunan pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menuju masyarakat tani yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan (Sumodiningrat, 2001).

Tingkat kesejahteraan masyarakat petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan taraf kehidupan masyarakat secara umum.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia.

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda utama yang harus segera diwujudkan dan berkelanjutan dalam pelaksanaannya (Husodo, 2009).

Tingginya jumlah penduduk miskin yang mayoritas adalah petani di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia dikarenakan rendahnya produktivitas dari petani itu sendiri. Adanya peningkatan produktivitas petani diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, peningkatan produktivitas mengalami kesulitan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Rendahnya produktivitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, akses permodalan, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan dan rendahnya kesehatan (Kartasmita, 1997).

Program-program pengentasan kemiskinan yang pernah dilaksanakan pemerintah diantaranya yaitu bentuk program bantuan penguatan modal yang diperuntukkan bagi petani. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964 dengan nama Bimbingan Massal (BIMAS). Tujuan dicanangkannya program tersebut untuk meningkatkan produksi, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam usahatani dan peningkatan produksi pangan secara nasional.

Program BIMAS dan kelembagaan kredit petani mengalami banyak perubahan dan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan. Tahun 1985 kredit BIMAS dihentikan dan diganti dengan Program Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai penyempurnaan dari sistem kredit massal BIMAS, dimana pola penyaluran yang digunakan pada saat itu adalah melalui KUD (Mubyarto, 1989).

Perkembangan bentuk program bantuan penguatan modal dari pemerintah lainnya adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program KKP diperkenalkan oleh pemerintah pada Bulan Oktober Tahun 2000 sebagai pengganti KUT. Program KKP merupakan bentuk fasilitasi modal untuk usahatani tanaman pangan (padi dan palawija), tebu, peternakan, perikanan dan pengadaan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani. Tahun 2001 pemerintah melalui Departemen Pertanian RI mengeluarkan kebijakan baru dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program BLM ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif, bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi, bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan

sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan, dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat petani (Sumodiningrat, 2001).

Salah satu program pemerintah dalam upaya mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat perdesaan yang saat ini sedang berjalan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM-MP merupakan program pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kementerian Dalam Negeri. PNPM-MP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta merupakan integrasi dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat.

Program yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat petani di perdesaan yang sekarang masih berlangsung yaitu Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2008 dan dilakukan secara terintegrasi dengan PNPM-Mandiri Perdesaan. Program PUAP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sesuai dengan

potensi pertanian desa sasaran. Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) dilakukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun, bukan berarti bahwa dana tersebut ditujukan untuk gapoktan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan organisasi gapoktan. Dana tersebut harus disalurkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang merupakan rumah tangga sasaran program PUAP. Gapoktan hanya berperan sebagai pengelola dana BLM-PUAP yaitu sebagai penyalur dana tersebut kepada RTM dan mengendalikan pemanfaatannya yaitu usaha agribisnis (Kementerian Pertanian, 2008).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, dimana perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian. Provinsi Lampung sangat fokus dengan program-program pengentasan kemiskinan dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Aksi Desa Mandiri Pangan, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan hampir semua dinas mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama program tersebut yaitu untuk mencapai struktur perekonomian yang kuat dan seimbang, baik bidang pertanian maupun non pertanian. Kenyataan di lapangan bahwa program-program pemerintah tersebut belum menuntaskan permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan penanganan dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Faktanya selama ini pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per provinsi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin per provinsi di Indonesia tahun 2006-2009

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin			
	Tahun 2006 (Jiwa)	Tahun 2007 (Jiwa)	Tahun 2008 (Jiwa)	Tahun 2009 (Jiwa)
NAD	1.149.700	1.083.700	962.300	885.800
Sumatera Utara	1.897.100	1.768.500	1.611.500	1.474.200
Sumatera Barat	578.700	529.200	473.700	426.100
Riau	564.900	574.500	584.700	532.000
Jambi	304.600	281.900	261.200	245.000
Sumatera Selatan	1.446.900	1.331.800	1.254.300	1.130.000
Bengkulu	360.000	370.600	328.900	317.900
Lampung	1.638.000	1.661.700	1.597.800	1.496.900
Bangka Belitung	117.400	95.100	80.300	76.000
Kepulauan Riau	163.000	148.400	131.800	125.300
DKI Jakarta	407.100	405.700	342.500	339.600
Jawa Barat	5.712.500	5.457.900	5.249.500	4.852.500
Jawa Tengah	7.100.600	6.557.200	6.122.600	5.655.400
DI Yogyakarta	648.700	633.500	608.900	574.900
Jawa Timur	7.678.100	7.155.300	6.549.000	5.860.000
Banten	904.300	886.200	830.400	775.800
Bali	243.500	229.100	205.700	173.600
Nusa Tenggara Barat	1.156.100	1.118.600	1.068.800	1.014.700
Nusa Tenggara Timur	1.273.900	1.163.600	1.105.800	1.021.800
Kalilimantan Barat	626.700	584.300	502.800	425.400
Kalimantan Tengah	212.800	210.300	194.300	166.900
Kalimantan Selatan	278.500	233.500	211.100	188.000
Kalimantan Timur	335.500	324.800	259.500	245.100
Sulawesi Utara	249.400	250.100	218.200	210.100
Sulawesi Tengah	553.500	557.400	525.200	483.100
Sulawesi Selatan	1.112.000	1.083.400	1.042.200	936.900
Sulawesi Tenggara	466.800	465.400	437.100	403.100
Gorontalo	273.800	241.900	182.900	165.100
Sulawesi Barat	205.200	189.900	156.900	155.300
Maluku	418.600	404.700	388.800	369.100
Maluku Utara	116.800	109.900	107.900	99.100
Papua Barat	284.100	266.800	237.300	227.600
Papua	816.700	793.400	709.300	709.400
Indonesia	39.295.500	37.168.300	34.534.200	31.761.700

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung, 2010

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2009 sebanyak 1.496.900 jiwa. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan yang cukup signifikan sekitar 6,31 % (Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2010).

Berdasarkan data di atas tampak bahwa Provinsi Lampung menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera setelah Nanggroe Aceh Darussalam. Program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan khususnya masyarakat petani di perdesaan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program tersebut diperuntukkan bagi desa yang miskin, namun memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase
Lampung Barat	419.037	79.500	19,0
Tanggamus	901.982	174.900	19,4
Lampung Selatan	912.490	222.500	24,3
Lampung Timur	951.639	206.300	21,7
Lampung Tengah	1.170.717	230.700	19,7
Lampung Utara	584.277	171.000	29,3
Way Kanan	406.123	79.200	19,5
Tulang Bawang	836.020	86.800	10,3
Pesawaran	398.848	100.900	25,3
Bandar Lampung	881.801	123.900	14,1
Metro	145.471	21.200	14,6
Jumlah	7.608.405	1.496.900	

Sumber : Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi keempat di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin mencapai 206.300 jiwa.

Program PUAP pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008 dan serentak di seluruh provinsi di Indonesia guna menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis petani yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan target 10.000 desa. Jumlah gapoktan penerima PUAP per kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah gapoktan penerima PUAP per kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2008-2010

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP		
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Metro	4	0	5
2	Lampung Barat	20	34	36
3	Lampung Selatan	25	21	30
4	Lampung Tengah	35	35	37
5	Lampung Timur	35	34	19
6	Lampung Utara	35	15	21
7	Mesuji	8	4	12
8	Pesawaran	10	18	14
9	Pringsewu	15	1	15
10	Tanggamus	20	25	34
11	Tulang Bawang	19	8	15
12	Way Kanan	35	33	24
13	Tulang Bawang Barat	8	5	1
Jumlah		269	233	263
Total TA. 2008, 2009, 2010		765		

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2011

Tabel 3 menunjukkan jumlah gapoktan penerima PUAP di Provinsi Lampung pada tahun 2008 hingga 2010 terdapat peningkatan dan penurunan penerima dana PUAP hingga tahun ke-3 yaitu tahun 2010.

Jumlah total penerima PUAP di Provinsi Lampung dari tahun 2008 hingga 2010 berjumlah 765 gapoktan/desa. Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan menerima 88 dana PUAP yang kemudian disalurkan kepada gapoktan yang berada di desa penerima PUAP. Penerima PUAP di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penerima PUAP tahun 2008 di Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Desa
1	Bandar Sribawono	Sri Pendowo, Waringin Jaya, Bandar Agung, Sadar Sriwijaya
2	Jabung	Gunung Sugih Kecil, Mumbang Jaya, Mekar Jaya, Gunung Mekar
3	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu IV, Labuhan Ratu VII, Raja Basa Lama Dua, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Tiga
4	Marga Sekampung	Purwosari
5	Marga Tiga	Negeri Katon, Negeri Tua, Negeri Jemanten, Tanjung Harapan, Nabang Baru
6	Pasir Sakti	Gedung Ringin, Mekar Sari, Pasir Sakti, Purworejo
7	Pekalongan	Adirejo
8	Sekampung	Sumber Gede, Karya Mukti, Giri Karto
9	Sukadana	Sukadana , Putra Aji Dua, Bumi Agung Udik, Pakuan Aji
10	Way Jepara	Sri Rejosari, Labuhan Ratu Dua, Braja Emas, Sri Wangi

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, 2011

Tabel 4 menunjukkan desa penerima Program PUAP tahun 2008 di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah total 35 desa penerima PUAP. Desa Sukadana Kecamatan Sukadana merupakan salah satu daerah penerima bantuan modal usahatani Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun anggaran 2008.

Gapoktan yang berada di Desa Sukadana bernama Harapan Sejahtera berdiri pada 10 Maret 2007 dan pada 7 Agustus 2008 secara resmi Gapoktan Harapan Sejahtera tercatat dalam akta notaris dan kemudian dikukuhkan. Proses seleksi dalam penerimaan dana PUAP, Gapoktan Harapan Sejahtera termasuk dalam gapoktan penerima dana BLM PUAP Tahun 2008. Jumlah anggota kelompok tani yang menerima penyaluran dana PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana pada tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah anggota kelompok tani yang menerima penyaluran dana PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana tahun 2009

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (Orang)	Jumlah Anggota Penerima PUAP Tahun 2009 (Orang)
1	Anggoro Kasih I	25	7
2	Anggoro Kasih II	25	6
3	Dewi Sri I	25	8
4	Harapan Makmur I	25	12
5	Harapan Makmur II	25	7
6	Sido Makmur IV	25	8
7	Madu Kelapa	25	19
8	Sinar Muda	25	9
9	Margo Rukun	25	14
10	Sido Mukti	25	6
11	Bina Marga	25	6
12	Marga Jaya II	25	10
13	Marga Jaya III	25	6
14	Rukun Santosa	25	7
Jumlah		350	125

Sumber : Gapoktan Harapan Sejahtera Desa Sukadana, 2011

Tabel 5 menunjukkan penerima dana PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana tahun 2009 berjumlah 125 orang petani dari 14 kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan Harapan Sejahtera.

Gapoktan Harapan Sejahtera menerima dana BLM PUAP sebesar Rp.100.000.000,- yang digunakan untuk keperluan petani penerima PUAP sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah ditetapkan oleh gapoktan dan anggota. Dana PUAP tersebut hingga bulan April tahun 2010 berkembang menjadi Rp.117.024.989,-. Jumlah petani penerima PUAP pada tahun 2008 berjumlah 120 petani dan pada tahun 2009 berjumlah 125 petani. Tujuan PUAP adalah 1) mengurangi kemiskinan, 2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, 3) memberdayakan kelembagaan petani, dan 4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani. Keberhasilan program PUAP tersebut harus didukung dengan adanya koordinasi antara aparat desa dan masyarakat petani untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan program PUAP. Kajian terhadap program PUAP dinilai penting untuk mengetahui pelaksanaan, keberhasilan program PUAP, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat petani di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?
2. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan keberhasilan Program PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?
3. Bagaimanakah dampak program PUAP terhadap kehidupan masyarakat petani di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan Program PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan Program PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
3. Dampak program PUAP terhadap kehidupan masyarakat petani di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan pertimbangan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan program PUAP selanjutnya.
2. Bahan informasi bagi gabungan kelompok tani dan kelompok tani penerima program PUAP di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
3. Bahan informasi bagi penelitian sejenis.